

ABSTRAK

Fadlyatul Zanat Sunandar (1225010048): *Dinamika Mukhtar Ke-22 Partai Nahdlatul Ulama Di Jakarta 1959*. Skripsi Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Peralihan politik Indonesia dari Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959 menempatkan Partai Nahdlatul Ulama (NU) dalam situasi politik dan organisatoris yang kompleks. Menguatnya kekuasaan Presiden Soekarno, berubahnya kedudukan partai politik, serta munculnya tuntutan untuk menyesuaikan perjuangan organisasi menjadikan Mukhtar ke-22 Partai NU yang diselenggarakan di Jakarta pada 13–18 Desember 1959 sebagai forum yang sangat penting. Mukhtar tersebut bukan hanya menjadi sarana pergantian kepengurusan, tetapi juga arena evaluasi kebijakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, penyampaian aspirasi cabang, penyempurnaan organisasi, dan perumusan sikap politik NU pada awal masa Demokrasi Terpimpin.

Penelitian ini bertujuan, pertama, mengetahui dinamika dan teknis pelaksanaan Mukhtar ke-22 Partai Nahdlatul Ulama, meliputi persiapan, kepesertaan, jalannya sidang pleno dan komisi, perdebatan, serta mekanisme pengambilan keputusan. Kedua, mengetahui dan menganalisis hasil Mukhtar ke-22 tahun 1959 dalam bidang politik, organisasi, sosial-keagamaan, dan kepengurusan serta relevansinya terhadap arah perjuangan Partai NU.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber primer meliputi notulen sidang pleno Mukhtar ke-22, dokumen keputusan resmi mukhtar, salinan pidato K.H. Abdul Wahab Chasbullah, serta pidato Presiden Soekarno. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, tesis, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah politik Nahdlatul Ulama dan Demokrasi Terpimpin. Sumber-sumber tersebut diuji melalui kritik ekstern dan intern, kemudian ditafsirkan dengan menggunakan pendekatan fiqh siyasah Muhammad Iqbal, khususnya prinsip musyawarah, kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mukhtar ke-22 berlangsung secara terorganisasi dan melibatkan unsur Pengurus Besar, wilayah, cabang, Syuriah, Tanfidziyah, serta badan-badan NU. Persidangan diwarnai perbedaan pandangan mengenai kebijakan PBNU, tata organisasi, keuangan, hubungan pusat-daerah, serta pemilihan pengurus, yang diselesaikan melalui musyawarah, sidang komisi, dan pengesahan pleno. Mukhtar menerima Demokrasi Terpimpin dengan tetap menegaskan prinsip permusyawaratan dan demokrasi. Selain itu, mukhtar menerima kembali UUD 1945, mempertahankan aspirasi Piagam Jakarta, menyerukan pembentukan Djabhah Islamiyah, mempertahankan NU sebagai partai politik, memperkuat bidang sosial-keagamaan, serta menetapkan kepengurusan PBNU periode 1959–1962. Keputusan tersebut mencerminkan sikap politik NU yang adaptif, tetapi tetap berlandaskan kemaslahatan umat dan nilai-nilai keagamaan.